



RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 - 2029

DISAMPAIKAN OLEH
BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2025

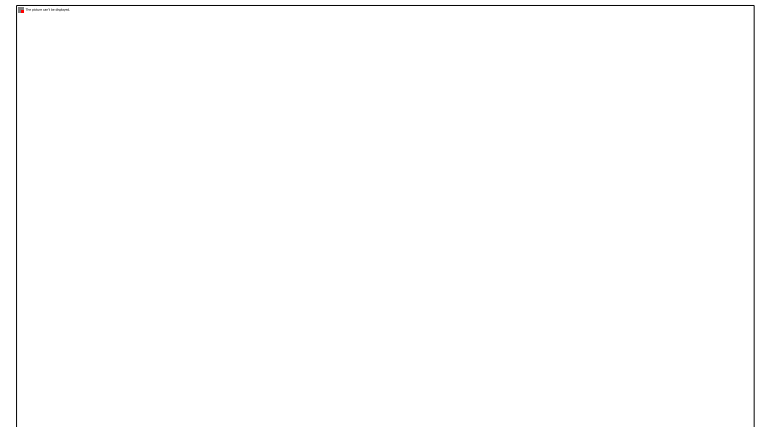


01.

Dasar Hukum dan Sistematika

RPJMD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029



RUMAH DATUK LAKSAMANA BUKIT BATU



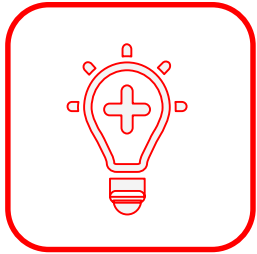
DASAR HUKUM



❑ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Pasal 65 ayat (1) huruf c menjelaskan salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD



❑ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 - 2029



Pasal 2 ayat (6) huruf b menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan dasar hukum penyusunan RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang termuat di dalam RPJMN



❑ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RANPERDA tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD



Pasal 49 ayat (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

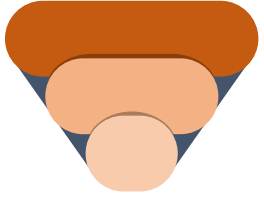


❑ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029



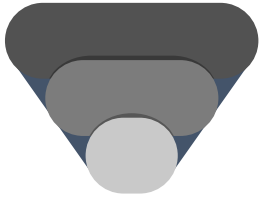
Instruksi KESATU huruf b menjelaskan Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025/2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

SISTEMATIKA DOKUMEN



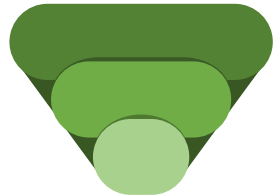
BAB I PENDAHULUAN

berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.



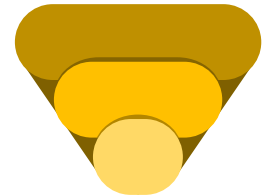
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah



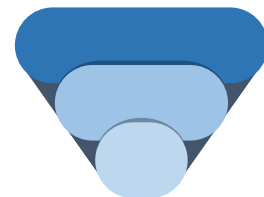
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

berisi visi, penjelasan unsur visi, misi, tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

berisi tentang Daftar program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah, IKU dan IKD.



BAB V PENUTUP

berisi tentang kaidah pelaksanaan manajemen resiko, pembiayaan pembangunan



02.

Capaian

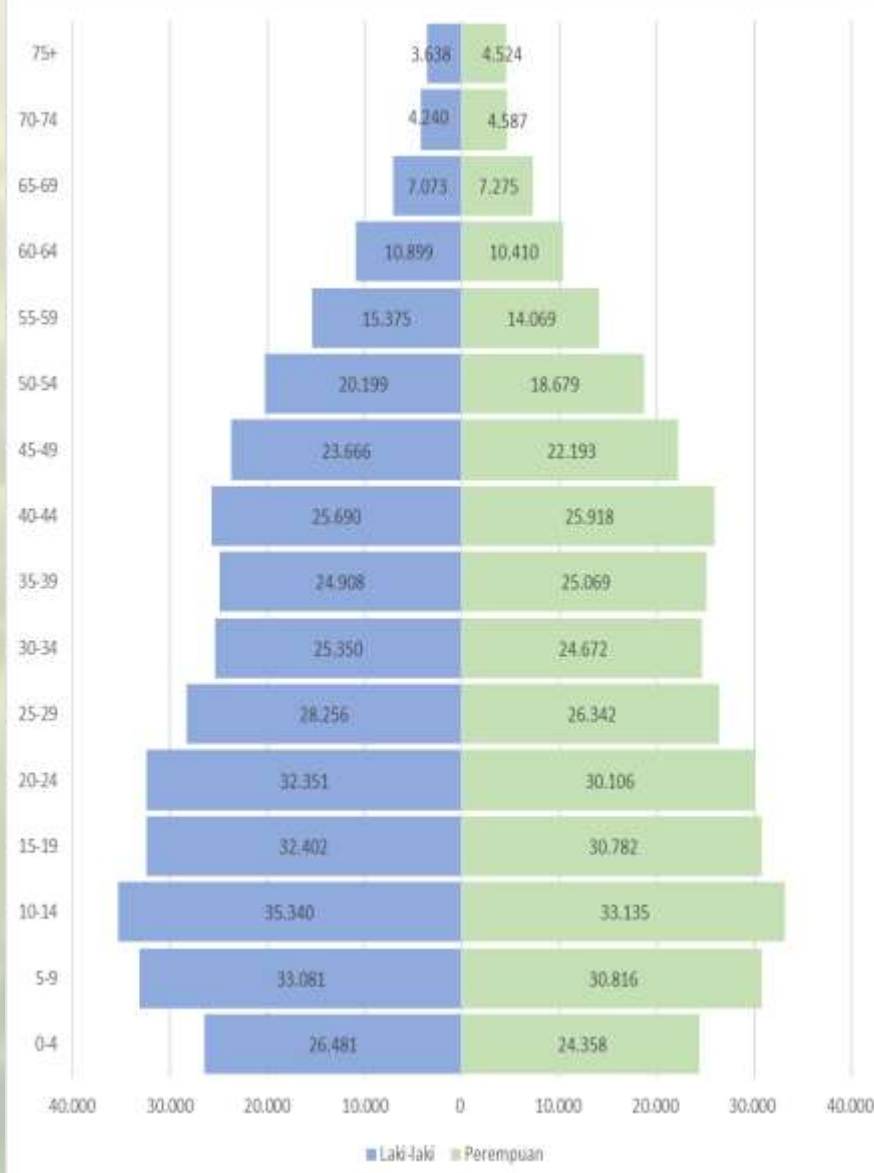
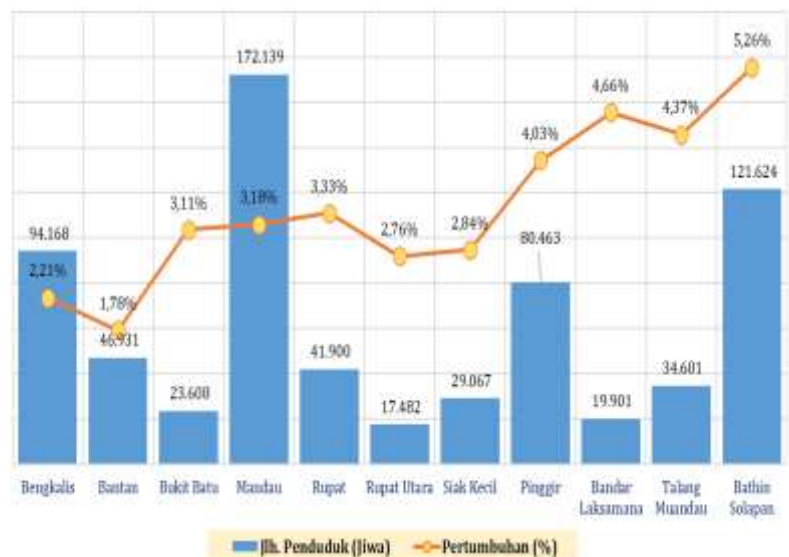
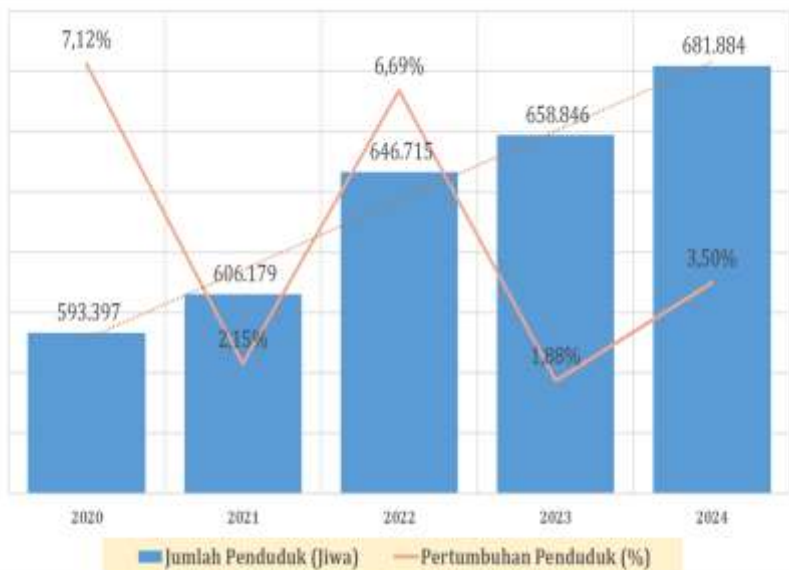
Pembangunan

Tahun 2020 - 2024



PULAU BETING ACEH RUPAT

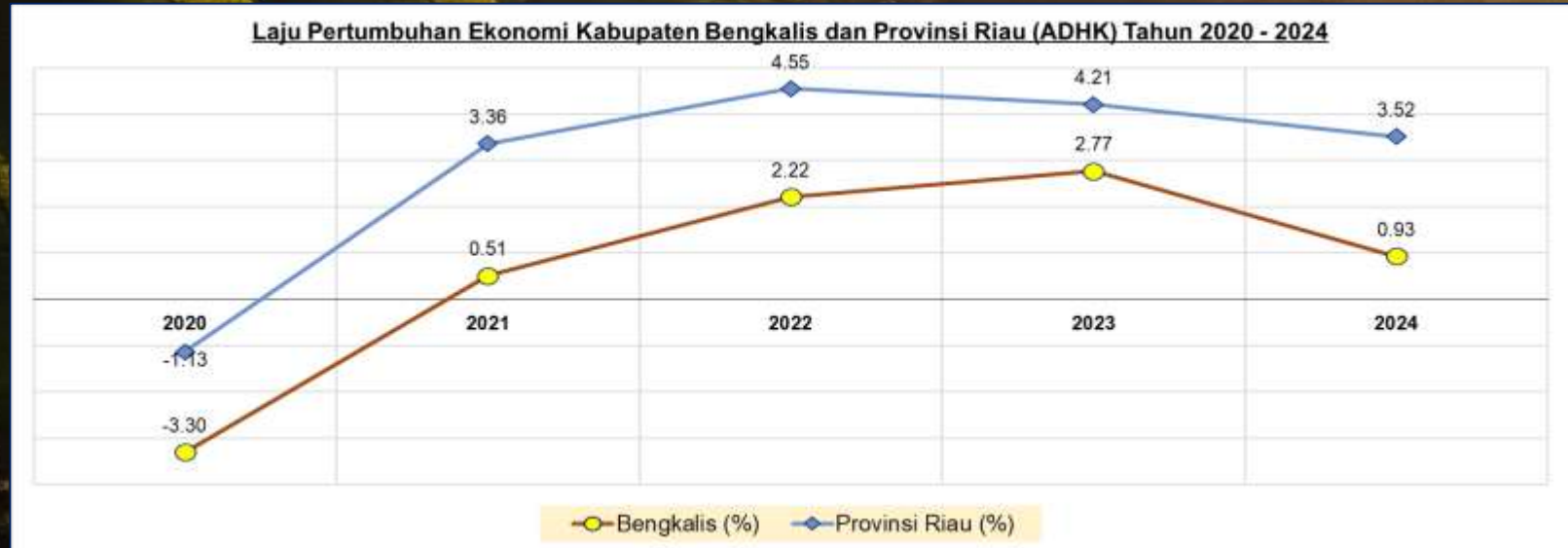
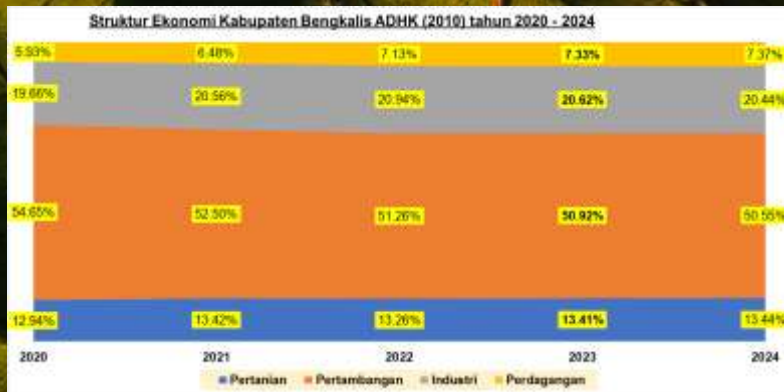
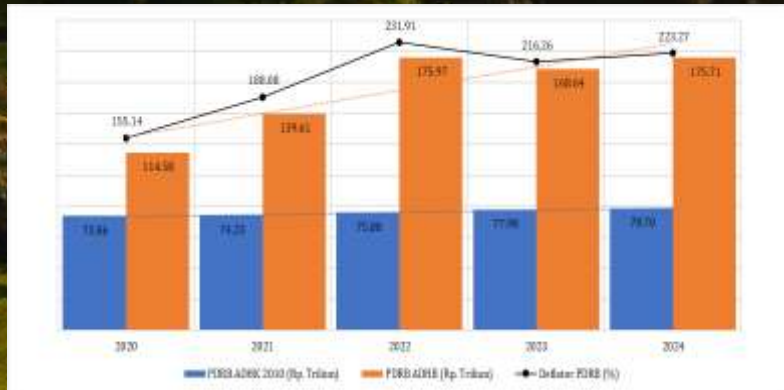
Perkembangan Kependudukan



- ❖ Jumlah penduduk mengalami pertambahan dari 593.397 jiwa pada tahun 2020 menjadi 681.884 jiwa pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahunnya sebesar 4,27%.
- ❖ Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mandau yaitu sebesar 172.139 jiwa (25,24%), Bathin Solapan 121.624 jiwa (17,84%) dan Bengkalis 94.168 jiwa (13,81%)
- ❖ Pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Bathin Solapan 5,26%

Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2024

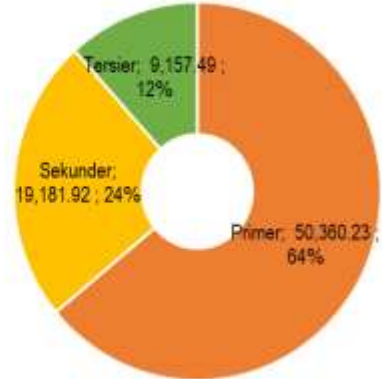
Perkembangan Perekonomian Daerah



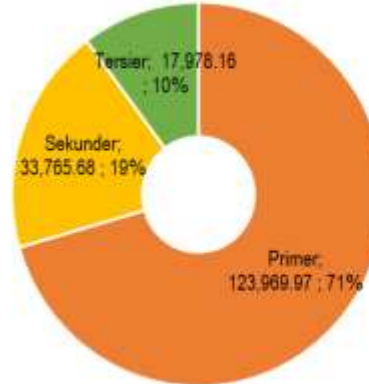
- ❖ Pertumbuhan ekonomi Bengkulu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Riau selama periode 2020-2024, namun Share PDRB Bengkulu tertinggi di Riau.
- ❖ Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu mengalami trend meningkat dari tahun 2020-2023 dan menurun pada tahun 2024, dan seiring dengan trend penurunan pertumbuhan ekonomi Riau.
- ❖ PDRB Riil (harga konstant) mengalami kenaikan yang lambat, sedangkan kenaikan PDRB Nominal (harga berlaku) disebabkan oleh kenaikan harga-harga yang mencapai lebih 200%.
- ❖ Struktur perekonomian Bengkulu dibentuk oleh Sektor Pertambangan 58,7% diikuti oleh Industri Pengolahan 15,49%, Sektor Pertanian 11,86% dan Sektor Perdagangan 7,02%.
- ❖ Secara riil, Sektor Pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan, sedangkan Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan mengalami kenaikan pertumbuhan dari tahun 2021 ke tahun 2024.

Struktur Perekonomian Daerah tahun 2024

PDRB LAPANGAN USAHA ADHK Tahun 2024



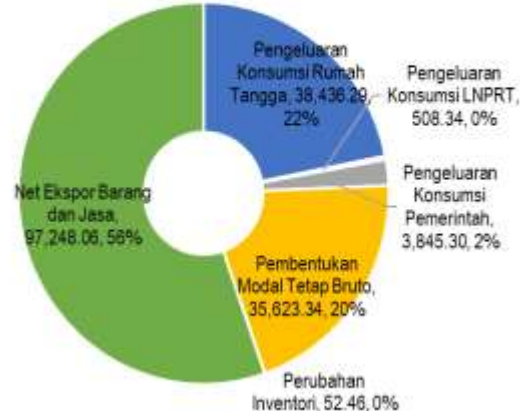
PDRB LAPANGAN USAHA ADHB Tahun 2024



PDRB PENGELUARAN ADHK Tahun 2024

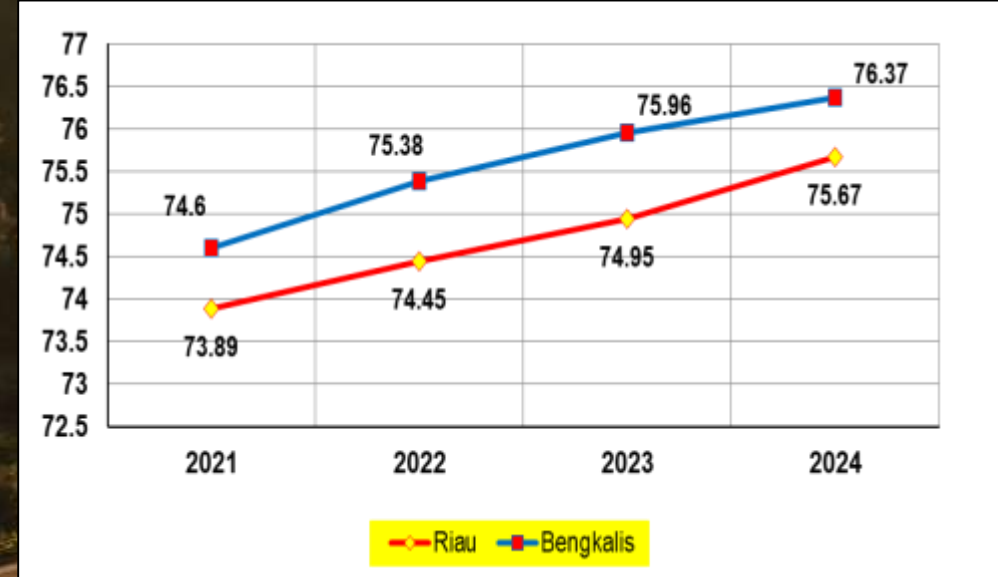
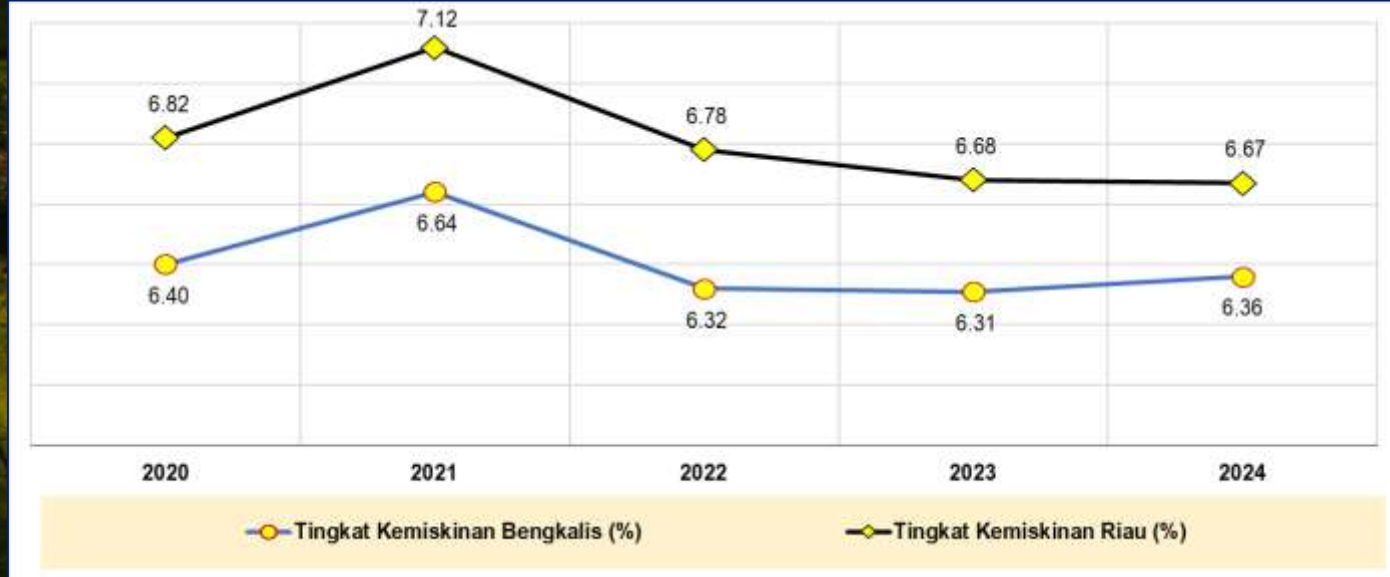


PDRB PENGELUARAN ADHB Tahun 2024

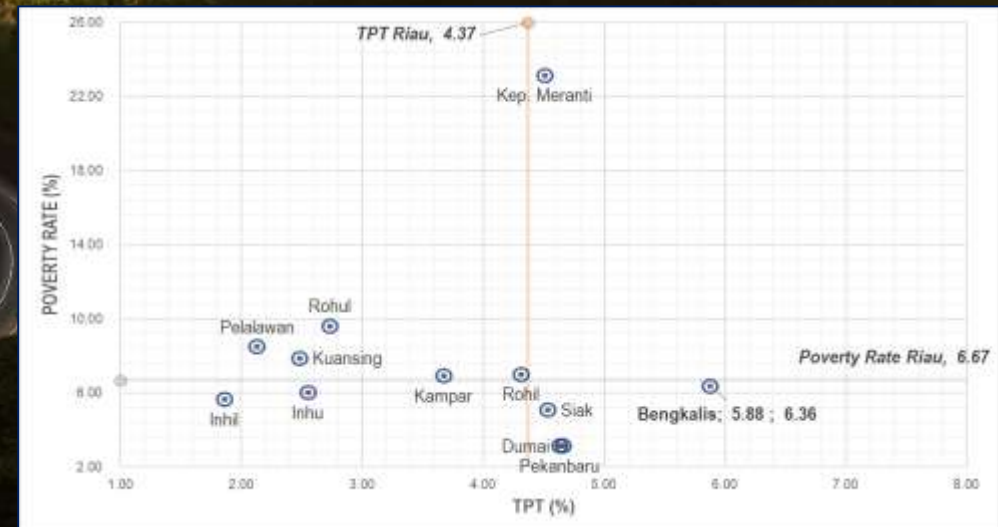


- ❖ Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Bengkalis menurut Lapangan Usaha dibentuk dari Sektor Primer sebesar 64% pada Harga Kosntan 2010 (PDRB Riil) dan sebesar 71% pada Harga Berlaku (PDRB Nominal) yang bersumber dari sektor Pertambangan (58,7%) dan Pertanian (11,86%)
- ❖ Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan atau Sektor Sekunder baru berkontribusi sebesar 24% pada ADHK dan 19% pada ADHB.
- ❖ Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Bengkalis menurut Pengeluaran dibentuk dari Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 52% dan Konsumsi Rumah Tangga 24% pada Harga Konstan 2010.
- ❖ Pembentukan Modal Tetap Bruto berkontribusi sebesar 21% sebagai potensi yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
- ❖ Pengeluaran Konsumsi Pemerintah hanya membentuk perekonomian daerah sebesar 3%.

Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat



- ❖ Tingkat Kemiskinan Bengkulu 6,36% pada tahun 2024, sedikit lebih rendah dari Tingkat Kemiskinan Riau yang sebesar 6,67% di tahun yang sama.
- ❖ Trend Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkulu menurun selama periode 2020-2024.
- ❖ IPM Bengkulu terus meningkat dari 74,6 pada tahun 2020 menjadi 76,37 pada tahun 2024.
- ❖ IPM Bengkulu No 4 tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2024,
- ❖ Tingkat Pengangguran Bengkulu (TPT) sebesar 5,88% lebih tinggi dari TPT Riau 4,37% pada tahun 2024.



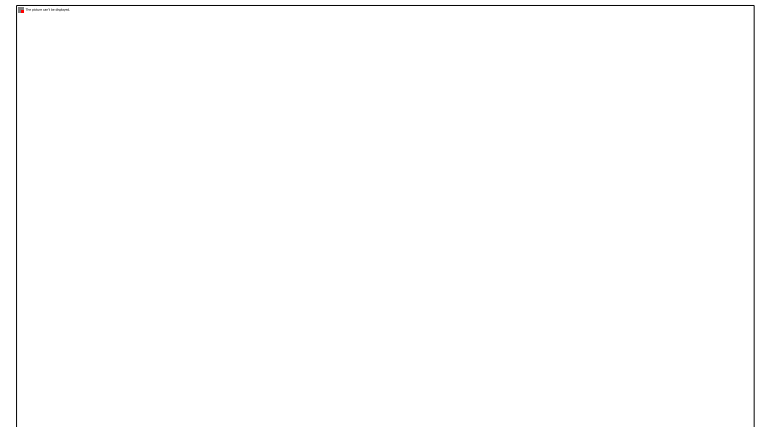


03.

**Isu Strategis,
Visi dan Misi
Program dan**

RPJMD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029



RUMAH DATUK LAKSAMANA BUKIT BATU



1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Secara Merata dan Inklusif
2. Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Efisien, Transparan, dan Berbasis Digital
4. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur serta Konektivitas Antarwilayah
5. Penguatan kearifan lokal Budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat dan landasan pembangunan daerah
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan

VISI

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG
BERMARWAH MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI
INDONESIA"**

MISI

- 01** *Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing*
- 02** *Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter*
- 03** *Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat*

VISI DAN MISI



PROGRAM UNGGULAN

01

Bantuan Keuangan 1 Milyar 1 Desa dan Tambahan 1 Milyar 1 Kelurahan 1 Kecamatan

- Penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- Revitalisasi dan penguatan sistem tata kelola Kelembagaan BUMDes
- Pembinaan umat satu desa satu penyuluh keagamaan
- Ketahanan Pangan Mendukung Program Swasembada Pangan

02

Beasiswa Pendidikan Khusus dan Berprestasi

- Memberikan beasiswa bagi dosen yang berprestasi untuk melanjutkan jenjang S3
- Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Bagi Sisw/Mahasiswa Ekonomi Lemah dan berprestasi.
- Memberikan Beasiswa khusus tahfis qur'an

03

Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat

- Pemberian Jaminan Kesehatan Total (100%) Bagi Masyarakat.
- Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan
- Penyediaan dokter untuk seluruh puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis.
- Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

04

Optimalisasi Pelayanan Transportasi Antar Pulau

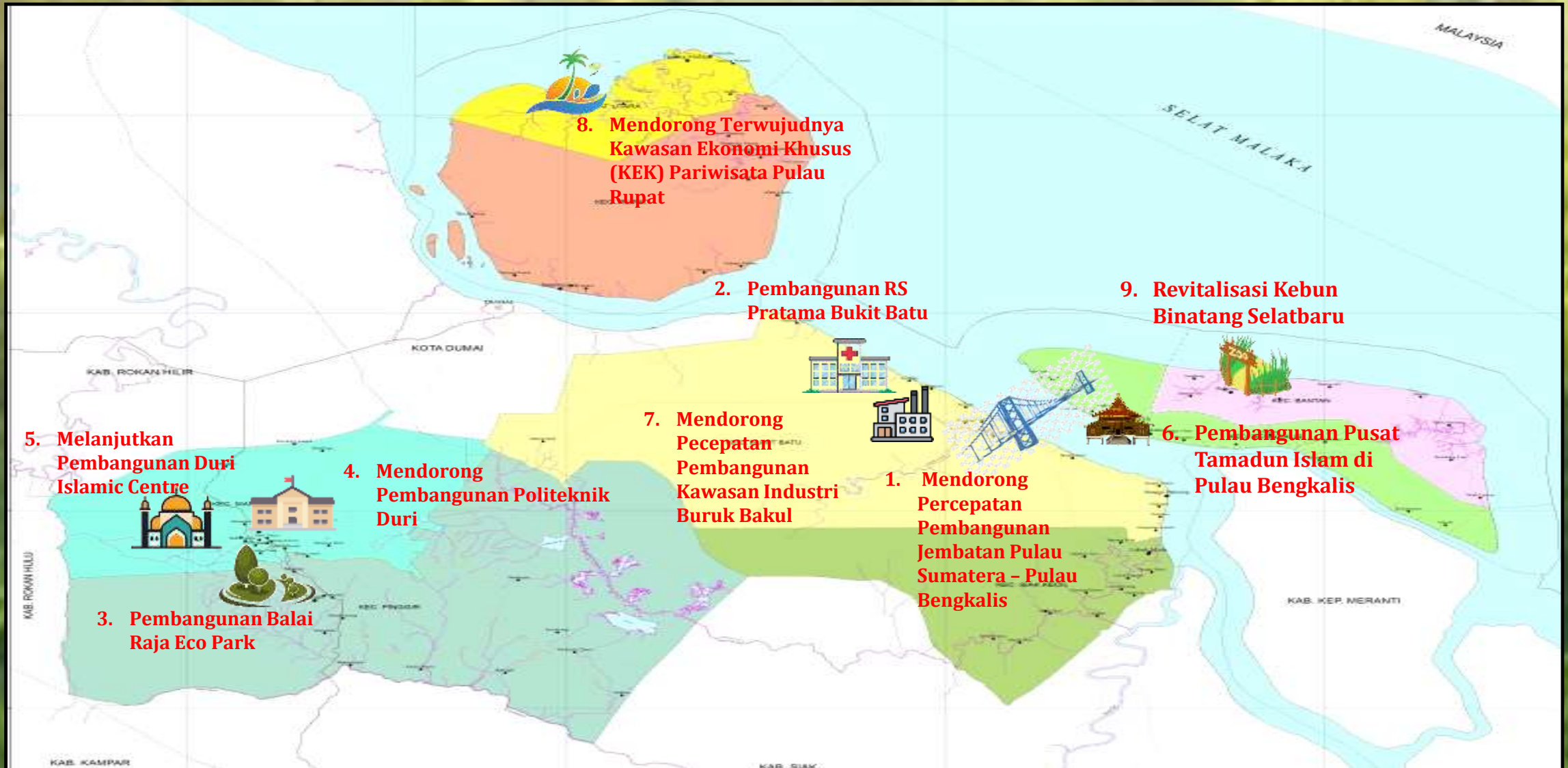
- Peningkatan fasilitas darat dan laut penyeberangan Ro-Ro.
- Penyediaan Fasilitas Layanan Tiket Non Tunai dan Realtime.
- Penguatan Armada Angkutan Pelayaran yang Layak.

05

Pelayanan Sistem Kependudukan Berbasis Mobile

- Mendekatkan Petugas Pelayanan Kependudukan Kepada Masyarakat
- Meningkatkan Sistem Pelayanan Kependudukan Berbasis Online
- Mobil Layanan Online Kependudukan (MOLDUK)

PROGRAM STRATEGIS



3. Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai Kawasan Pariwisata Unggulan dan Perikanan

1. Kecamatan Bengkalis dan Bantan sebagai Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perikanan dan Pengembangan Budaya Melayu

4. Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai Kawasan Industri Migas, Perdagangan dan Jasa

2. Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan Pertanian, Perkebunan dan Industri Pengolahan.

1. Kecamatan Bengkalis dan Bantan sebagai Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perikanan dan Pengembangan Budaya Melayu

2. Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan Pertanian, Perkebunan dan Industri Pengolahan.

4. Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai Kawasan Industri Migas, Perdagangan dan Jasa

EMPAT KLUSTER PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN

01

Kecamatan Bengkalis & Bantan sebagai pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perikanan & Pengembangan Budaya Melayu.

- • Pembangunan Sekolah Unggul.
- Mendorong Pendirian Sekolah-sekolah Agama yang baru.
- Mendorong penguatan Perguruan Tinggi yang ada.
- Menyiapkan kurikulum sekolah yang lntegrasi dengan pendidikan agama dan muatan lokal berbasis budaya melayu.
- Penguatan peran Lembaga Adat Melayu Riau
- Penanganan Abrasi
- Mendorong berdirinya PLBN Bantan.

02

Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan Pertanian, Perkebunan dan Industri Pengolahan.

- • Updating Data Perkebunan dan Lahan Pertanian Pangan.
- Mendorong pembangunan Food Estate.
- Memaksimalkan keberadaan Giam Siak Kecil Bukit Batu.
- Optimalisasi Aset ex RPC di Desa Sepotong.
- Review desain dan Pembangunan Jalan poros Duri – Pakning.
- Optimalisasi dan Revitalisasi Kawasan Wisata Sejarah dan Cagar Budaya Datuk Laksamana Raja di Laut.
- Penguatan Program Perhutanan Sosial.

03

Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai Kawasan Pariwisata Unggulan dan Perikanan

- • Redesain Kawasan Wisata Pulau Rupat
- Optimalisasi RS Pratama Pulau Rupat.
- Menuntaskan Pembangunan jalan poros Batu Panjang – Tanjung Medang.
- Pembangunan akses ke kawasan wisata.
- Penanganan Abrasi.
- Mendorong berdirinya PLBN Rupat Utara.

04

Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai Kawasan Industri Migas, Perdagangan dan Jasa

- • Penataan kawasan perkotaan, antara lain; Penanganan sampah, pedestrian dan Ruang Terbuka Hijau.
- Penyediaan Air Bersih.
- Penataan Sanitasi guna Mencegah Banjir.
- Pembangunan Sekolah Unggul.
- Penguatan peran perusahaan dalam pembangunan

04.

**Tujuan,
Sasaran,
Target Indikator Per Misi**

RPJMD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029



PANTAI INDAH SELAT ABRU

MISI 1 *Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing*

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1	TUJUAN MISI 1 : Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,93	1,59 - 2,83	1,71 - 2,88	1,81 - 2,93	1,92 - 2,97	2,0 - 3,02	2,09 - 3,07
			Indeks Daya Saing Daerah	3,39	3,04	3,10	3,17	3,23	3,29	3,35
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5,88	5,54 - 5,72	5,16 - 5,56	4,80 - 5,34	4,77 - 5,16	4,58 - 5,03	4,23 - 4,93
			Rasio Gini	0,279	0,259 - 0,262	0,242 - 0,246	0,226 - 0,231	0,211 - 0,217	0,197 - 0,204	0,183 - 0,191
			Pendapatan Perkapita	296,91	297,96 - 298,95	311,87 - 315,41	325,78 - 331,86	339,69 - 348,315	353,6 - 364,77	367,51 - 381,23
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,37	76,65 - 76,73	77,02 - 77,28	77,49 - 77,84	77,97 - 78,4	78,45 - 78,97	78,94 - 79,55
			Tingkat Kemiskinan	6,36%	6,27 - 6,33	6,12 - 6,20	6,09 - 6,16	6,06 - 6,12	6,03 - 6,09	5,92 - 5,99
	1.1.1	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkeadilan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,49	16,18	16,42	16,64	16,83	17,00	17,14
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,28	66,37	67,23	68,09	68,95	69,81	70,67
	1.1.2	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan Berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	20,27	20,34	20,51	20,68	20,85	21,02	21,19
	1.1.3	Terwujudnya Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,30	0,31	0,32	0,34	0,37	0,40	0,44
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	3.311	3.417	3.526	3.639	3.756	3.876	4.000
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,32	4,36	4,51	4,65	4,80	4,94	5,09
	1.1.4	Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	65,75	66,01	67,59	69,75	70,67	72,54	74,08
	1.1.5	Terwujudnya Petani yang Sejahtera	Nilai Tukar Petani	173,22	168,96	175,67	182,65	189,91	197,45	205,3
			Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	11,86	12,82	13,42	14,02	14,61	15,20	15,78
	1.1.6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,21	74,34	74,55	74,76	74,97	75,18	75,40
	1.1.7	Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata	Angka Harapan Lama Sekolah	13,44	13,62	13,78	13,94	14,10	14,26	14,42
			Rata-Rata Lama Sekolah	9,74	9,75	9,77	9,78	9,79	9,81	9,82
	1.1.8	Meningkatnya kualitas kepemudaan daerah	Jumlah Prestasi Olahraga (cabang)	10	13	16	19	22	25	28
	1.1.9	Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,47	90,48	90,49	90,5	90,51	90,52	90,53
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,4	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,05 (2023)	63,35	64,65	65,95	67,25	68,55	69,85
	1.1.10	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan	Persentase PPKS yang meningkat kesejahteraannya							
			Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	4,88 (2023)	4,89-5,62	5,64-6,14	6,39-7,39	7,15-8,65	7,90-9,90	8,66-11,16

MISI 2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter Birokrasi dan Penguatan Nilai-Nilai Agama

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1	TUJUAN MISI 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu		Indeks Reformasi Birokrasi	65,12	66,53	68,04	69,57	71,05	72,52	74,08
			Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan							
			Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.							
	2.1.1	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,79	2,88	2,97	3,06	3,15	3,24	3,33
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
			Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik							
	2.1.2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Persentase Peningkatan PAD	-34,26%	5,23%	5,34%	5,42%	5,58%	5,67%	5,73%
			Indeks Akses Keuangan Daerah							
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah							
	2.1.3	Meningkatnya budaya kerja Asn Yang profesional dan Berintegritas	Indeks Profesionalis ASN	76,66 (2023)	77,26	78,60	79,94	81,27	82,61	83,95
			Indeks Sistem Merit							
	2.1.4	Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	37,38	40,85	44,37	47,83	51,36	54,82	58,34
	2.1.5	Terciptanya kerukunan umat beragama	Persentase penyelesaian konflik SARA							
	2.1.6	Meningkatnya pelestarian budaya melayu	Indeks Pelestarian Budaya Melayu							



MISI 3 *Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat*

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1	TUJUAN 3 : Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan		Indeks konektivitas wilayah							
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur							
			Penurunan Intensitas emisi GRK (%)		13,95	17,17	20,37	23,88	27,75	31,52
	3.1.1	Terbangunnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah							
	3.1.2	Ketersediaan infrastruktur dasar yang handal dan merata antarwilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap							
			Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	75,77	77,58	79,44	81,33	83,28	85,27	87,31
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%)	95,72	96,14	96,65	97,13	97,66	98,13	98,67
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%)	91,11 (2023)	91,65	92,19	92,73	93,28	93,83	94,38
			Persentase lingkungan permukiman kumuh	1,28	1,15	1,04	0,93	0,84	0,76	0,68
			Rasio pemukiman layak huni	99,40	99,52	99,59	99,63	99,70	99,79	99,86
	3.1.3	Berkembangnya kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan identitas wilayah	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	73,31	74,78	76,27	77,80	78,96	80,15	81,75
			Persentase ketersediaan infrastruktur dasar wilayah perbatasan							
3.1.4	Terjaganya kualitas lingkungan dan meningkatnya ketangguhan daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,57	73,50	73,71	73,92	74,13	74,35	74,56	
		Indeks Risiko Bencana	137,73	126,684	122,378	118,072	113,766	109,46	105,154	

JUMLAH TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS Per-MISI

MISI 01

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing

1 Tujuan
(Hal. III.283)

10 Sasaran
(Hal. III.283)

14 Strategi
(Hal. III.289)

11 Arah Kebijakan
(Hal. III.295)

26 Program Prioritas
(Hal. III.320)

MISI 02

Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter

1 Tujuan
(Hal. III.285)

6 Sasaran
(Hal. III.285)

11 Strategi
(Hal. III.290)

9 Arah Kebijakan
(Hal. III.296)

21 Program Prioritas
(Hal. III.325)

MISI 03

Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat

1 Tujuan
(Hal. III.286)

4 Sasaran
(Hal. III.286)

8 Strategi
(Hal. III.292)

4 Arah Kebijakan
(Hal. III.295)

15 Program Prioritas
(Hal. III.328)



05.

Rencana Kebijakan Keuangan

RPJMD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029



CAGAR BIOSFER GIAM SIAK KECIL



PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi (Rp)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PENDAPATAN	3,525,740,871,817.72	3,689,626,108,505.00	3,754,523,406,402.65	3,819,016,589,071.11	3,901,864,146,421.01	3,987,770,600,280.41	4,076,878,011,688.47
1.	Pendapatan Asli Daerah	404,020,796,658.72	471,871,344,060.00	495,464,911,263.00	520,238,156,826.15	546,250,064,667.46	573,562,567,900.83	602,240,696,295.87
1.1	Pajak Daerah	137,788,533,547.00	247,532,500,000.00	259,909,125,000.00	272,904,581,250.00	286,549,810,312.50	300,877,300,828.13	315,921,165,869.53
1.2	Retribusi Daerah	175,269,009,198.46	173,715,554,145.00	182,401,331,852.25	191,521,398,444.86	201,097,468,367.11	211,152,341,785.46	221,709,958,874.73
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	73,977,162,709.00	23,391,489,915.00	24,561,064,410.75	25,789,117,631.29	27,078,573,512.85	28,432,502,188.49	29,854,127,297.92
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	16,986,091,204.26	27,231,800,000.00	28,593,390,000.00	30,023,059,500.00	31,524,212,475.00	33,100,423,098.75	34,755,444,253.69
2	Pendapatan Transfer	3,121,720,075,159.00	3,217,754,764,445.00	3,259,058,495,139.65	3,298,778,432,244.96	3,355,614,081,753.55	3,414,208,032,379.58	3,474,637,315,392.60
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,992,706,803,607.00	3,105,023,820,440.00	3,140,691,003,934.40	3,174,492,566,479.44	3,225,113,922,699.76	3,277,182,865,373.10	3,330,760,890,035.80
2.1.1	Transfer Dana Perimbangan	2,846,102,914,511.00	2,960,391,010,440.00	2,994,533,414,054.40	3,026,793,379,885.04	3,075,856,123,007.51	3,126,349,234,027.37	3,178,334,003,646.93
2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	2,151,996,944,000.00	2,173,516,913,440.00	2,195,252,082,574	2,217,204,603,400.14	2,239,376,649,434.15	2,261,770,415,928.49	2,284,388,120,087.77
2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	394,237,768,555.00	453,849,351,000.00	462,926,338,020.00	469,870,233,090.30	493,363,744,744.82	518,031,931,982.06	543,933,528,581.16
2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	299,868,201,956.00	333,024,746,000.00	336,354,993,460.00	339,718,543,394.60	343,115,728,828.55	346,546,886,116.83	350,012,354,978.00
2.2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	146,603,889,096.00	144,632,810,000.00	146,157,589,880.00	147,699,186,594.40	149,257,799,692.26	150,833,631,345.73	152,426,886,388.87
	Dana Desa	131,472,055,096.00	136,787,632,000.00	138,155,508,320.00	139,537,063,403.20	140,932,434,037.23	142,341,758,377.60	143,765,175,961.38
	Dana Insentif Fiskal	15,131,834,000.00	7,845,178,000.00	8,002,081,560.00	8,162,123,191.20	8,325,365,655.02	8,491,872,968.12	8,661,710,427.49
2.3	Transfer Antar Daerah	129,013,271,552.00	112,730,944,005.00	118,367,491,205.25	124,285,865,765.51	130,500,159,053.79	137,025,167,006.48	143,876,425,356.80

AGENDA PENYUSUNAN RPJMD KAB. BENGKALIS TAHUN 2025 - 2029

No	TAHAPAN	Tanggal Perkiraan Pelaksanaan	
		AWAL	PERUBAHAN
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD			
-	Penyempurnaan Rantek RPJMD menjadi Ranwal RPJMD	20 Februari 2025	Sesuai Schedule Awal
-	Forum Konsultasi Publik	10 Maret 2025	Sesuai Schedule Awal
-	Pengajuan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk pembahasan	24 Maret 2025	Sesuai Schedule Awal
-	Kesepakatan rancangan awal RPJMD dengan DPRD	8 - 11 April 2025	Sesuai Schedule Awal
-	Konsultasi Ranwal dengan Gubernur	21 April 2025	05 Juni 2025
-	Tindak lanjut Konsultasi	22 -24 April 2025	10-13 Juni 2025
-	Forum Lintas OPD Penyelarasan Ranwal Renstra	25 - 28 April 2025	16 Juni 2025
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD			
-	Musrenbang	30 April 2025	23 Juni 2025
-	Review APIP Inpektorat terhadap Rancangan RPJMD	1 - 16 Mei 2025	24 Juni 2025
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD			
-	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD	19 Mei 2025	30 Juni 2025
-	Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD	14 - 16 Juli 2025	28 - 31 Juli 2025
PENETAPAN RPJMD			
-	Menyampaikan Ranperda tentang RPJMD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk EVALUASI	18 Juli 2025	05 Agustus 2025
-	Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD	selambat-lambatnya 20 Agustus	selambat-lambatnya 20 Agustus



TERIMA KASIH

PEMBAHASAN KESEPAKATAN DENGAN DPRD TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RPJMD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025-2029

Presented by:
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS



PANEN RAYA DI DESA MENTAYAN